

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Enam. 1996.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita Cetakan Ketiga Puluh, Jakarta, 1999
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Barata, Atep Adya. *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi Dan Menghindari Sengketa Pajak Dan Bea Cukai*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1989.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Campbell, Henry Black. *Black's Law Dictionary*. Saint Paul Minnesora: West Publishing Company. 1979.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius. 1992.

- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Cet. 9. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Lubis, Sulaikin; Wismar 'Ain Marzuki; dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Meliala, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata Edisi Pertama*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mustafa, Bachasan. *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1979.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law an Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti. Jakarta: PT. Tata Nusa. 2001.
- Moh. Saleh Jindang, & Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.1983.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Edisi 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Siahaan, Marihot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Shidarta, Darji Darmadiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Soemaryono dan Anna Erliyana. *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999.
- Soemitro, Rochmat. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1964.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Solly Lubis, Muhammad. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.

- Sugiharti, Dewi Kania. *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata Edisi Pertama*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)*.
- . *Undang-Undang Pengadilan Pajak*. UU No. 14 Tahun 2002. LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189.
- . *Undang-Undang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.
- . *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. UU No. 8 Tahun 2004. LN No 34. Tahun 2004, TLN No. 4379.
- . *Undang-Undang Peradilan Umum*. UU No. 2 Tahun 1986. LN No 20. Tahun 1986, TLN No. 3327.
- . *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
- . *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

- . *Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
- . *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.* UU No. 19 Tahun 2000. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987.
- . *Undang-Undang Mahkamah Agung.* UU No. 14 Tahun 1985. LN No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316.
- . *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.* UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,* UU No. 16 Tahun 2000. LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.* PP No. 80 Tahun 2007. LN No. 169 Tahun 2007, TLN No. 4797.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2017.
- . *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008.

----- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005.

----- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.

*RIB/HIR Dengan Penjelasan [Herzeine Inlandsch Reglement].* Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi [Burgerlijk Wetboek].* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Kode Etik Profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

### C. Kamus Hukum

Andrea, Fockema. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia.* Cet. 1. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum.* Cet. 10. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

### D. Internet

“Peradilan Pajak Tidak Berdiri Sendiri.” <<http://www.kompas.com>>. 3 Juli 2001.